Tribun Jogja

JUMAT WAGE
3 JUNI 2016
26 SYA'BAN 1437
NO 1759 /TAHUN 5

NEWS ANALYSIS

Harus Cerewet Kawal Pejabat

DOK.

TUNJUNG SULAKSONO
Pengamat Politik dari UMY

GERINDRA sebagai sebuah partai tentu punya mekanisme internal yang harus dihormati oleh masyarakat, termasuk ketika mekanisme menujuk Suharsono sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Bantul.

Karena memang setahu saya tidak ada aturan negara ini yang melarang rangkap jabatan antara politisi dengan pejabat. Bahkan di Inggris, perdana menteri adalah seorang ketua partai. Ini membuktikan hal itu memungkinkan dan sah.

Namun kita harus ingat pola

● ke halaman 11

Harus Cerewet Kawal Pejabat

● Sambungan **Hal 1**

dan mekanisme politik di Inggris relatif mapan dan stabil. Mencegah penyalah gunaan kekuasaan oleh perdana menteri yang notabene seorang ketua parpol pemenang pemilu.

Dalam konteks Indonesia kita harus menyadari, seorang ketua parpol dalam berbagai tingkatan itu juga merangkap sebagai seorang pejabat publik akan memunculkan kemungkinan yang sifatnya negatif.

Karena seringkali kita melihat ada benturan partai dengan pemerintah atau masyarakat. Kalau ada hal seperti itu, maka seorang ketua partai yang menjadi pejabat publik, baik itu wali kota maupun bupati tentu harus hati-hati mengambil keputusan.

Negarawan

Yang dibutuhkan seorang pejabat publik adalah kenegarawanan. Tapi sebagi pimpinan partai dia adalah politisi. Kedua hal ini sering memunculkan konflik karena belum tentu kepentingan rakyat bisa konvergen dengan kepentingan partai.

Kemudian masyarakat akan susah untuk melihat, ketika seorang pejabat publik yang juga seorang politisi melakukan sesuatu itu dalam konteks yang mana? Misalnya ketika melakukan tugas tertentu dalam rangka partai tapi menggunakan fasilitas pemerintahan tentu akan susah dibedakan.

Banyak sekali contoh pejabat publik yang merangkap jabatan sebagai pimpinan parpol tertentu terkena banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan. Maka, seperti yang ditekankan Jokowi dalam membangun kabinetnya, orang dikabinet adalah orang yang bebas dari struktural partai.

Mereka harus memilih menjadi anggota kabinet atau anggota parpol. Walupun tidak selalu terjadi, namun potensial sekali bagi pimpinan atau kepala partai untuk terlibat dalam konflik kepentingan atau kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Yang bisa dilakukan adalah memperkecil terjadinya itu dan pemisahan antara pejabat publik dengan pimpinan partai adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko.

Harus cerewet

Maka yang harus dilakukan publik, mau tidak mau elemen *civil society* daerah tersebut, misalnya Bantul harus "cerewet".

Lebih banyak memonitor, terlibat tidak hanya dalam proses elektoral semata namun juga mengawal agar bagaimana kekhawatiran publik terkait dengan benturan kepentingan ataupun penyalahgunaan kekuasaan itu tidak terjadi.

Pers juga punya peran sangat strategis untuk selalu menduplikasi proses pengawalan yang dilakukan *civil society* dalam bentuk diseminasi informasi agar masyarakat tahu jika ada suatu kelemahan atau pelanggaran.**(una)**